

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guru adalah sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak penentu keberhasilan sebuah proses pendidikan. Hal tersebut didasari atas suatu pemikiran bahwa guru merupakan figur sentral yang bersentuhan secara langsung dengan peserta didik yang memegang peranan kunci dalam penyelenggaraan proses pembelajaran guna pencapaian tujuan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang guru pada pasal 6 ayat 1 yaitu kewajiban guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran adalah perencana, pelaksana sekaligus mengevaluasi hasil pembelajaran serta mengadakan perbaikan dan pengayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kinerja guru secara intens ditentukan oleh motivasi dan komitmen yang tinggi serta kompetensi yang dimilikinya (Sudjana, 2012:30). Salah satu tolok ukur kompetensi guru adalah hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Hasil UKG secara tidak langsung merefleksikan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru yang bersangkutan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, hasil rata-rata nasional Uji Kompetensi Awal (UKA) guru tahun 2012 adalah 42,25 yang mencakup seluruh peserta dari jenjang TK sampai jenjang SMA. Adapun rincian hasil rata-rata per jenjang sekolah terdiri dari rata-rata guru TK 58,9; guru SD 36; guru SMP 46 dan guru

SMA 51,35. Dari hasil UKA tersebut menempatkan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat teratas dengan nilai rata-rata (50,1) disusul oleh DKI Jakarta (49,2), Bali (48,9), Jawa Timur (47,1), dan Jawa Tengah (45,2). Sebaliknya, lima provinsi yang memperoleh nilai rata-rata terendah adalah Maluku (34.5), Maluku Utara (34.8), Kalimantan Barat (35.40), Kalimantan Tengah (35.5), dan Jambi (35.7). Selanjutnya, hasil UKG pada tahun 2015 peringkat teratas masih dipegang oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (62.36) dan provinsi Jambi berada di urutan 22 dengan nilai rata-rata 48,69. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Tebo, secara lebih spesifik memaparkan bahwa nilai rata-rata UKG bahasa Inggris SMA Kabuapten Tebo adalah 62.12, namun demikian dari 36 guru Bahasa Inggris SMA peserta UKG Tahun 2015 masih terdapat 20 orang guru yang memperoleh nilai dibawah 60.

Nilai kompetensi guru sebagaimana yang dikemukakan kementerian pendidikan tersebut di atas merupakan gambaran umum mengenai rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh guru-guru sekolah di negeri ini khususnya di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Hasil UKG tersebut diatas semakin mempertegas bahwa sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan, keberadaan guru masih perlu dikontrol dan dibina dengan sebaik mungkin guna meningkatkan kinerjanya. Pengontrolan dan pembinaan guru bisa dilakukan melalui supervisi akademik yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pengawas sekolah maupun kepala sekolah selaku supervisor. Tujuan akhir supervisi akademik tidak hanya pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru, namun harus sampai pada meningkatnya hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini senada dengan apa yang

dinyatakan oleh Sudjana (2012a: 54) bahwa esensi supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada para guru agar mereka dapat mempertinggi kualitas pembelajarannya.

Menurut Alfonso, Firth dan Neville (Sudjana, 2012a: 55) supervisi akademik harus langsung menyentuh, mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Supervisi akademik yang sukses yaitu supervisi akademik yang dapat : (1) membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya, (2) meningkatkan kualitas pembelajaran, dan (3) mendorong tumbuhnya tanggung jawab, kemauan belajar dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab profesi. Melalui supervisi akademik diharapkan guru semakin mampu memfasilitasi proses belajar peserta didik sehingga mereka memperoleh hasil belajar yang lebih optimal.

Sayangnya, rendahnya kompetensi dan keterbatasan jumlah atau bahkan ketiadaan supervisor/pengawas mata pelajaran secara tidak langsung berimbas pada kualitas supervisi akademik yang dilakukan. Menurut Sutikno (2014:11), kualitas supervisi akademik adalah kemampuan supervisor dalam memberikan supervisi akademik yang sesuai dengan keinginan , memenuhi kebutuhan bahkan melebihi harapan guru. Kualitas supervisi akademik sangat ditentukan oleh kompetensi akademik maupun kualifikasi pendidikan pengawas itu sendiri. Tidak berbeda jauh dengan hasil UKG yang masih dibawah standar, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Tebo, hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi hanya memperoleh nilai rata-rata 38,01. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi Pengawas yang berada di Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Rendahnya kompetensi tersebut tentu akan berimplikasi terhadap kualitas supervisinya.

Selain kompetensi yang dimiliki pengawas sekolah, kualifikasi pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas supervisi yang dilakukannya. Seorang supervisor baik itu pengawas sekolah maupun kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik tentunya harus menguasai karakteristik setiap mata pelajaran dari guru yang akan disupervisi. Seorang pengawas yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan berlatar belakang pendidikan rumpun MIPA tentunya akan menemui berbagai kendala jika harus mensupervisi guru pada rumpun bahasa. Bahkan, seorang supervisor dengan latar belakang pendidikan bahasa Indonesia tentu saja belum seoptimal supervisor dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris jika ia harus mensupervisi guru bahasa Inggris walaupun mereka sama-sama berada dalam rumpun bahasa. Menurut Prihatin, Samsudi, dan Jurotun (2015: 28) terjadinya *mismatch* atau ketidaksesuaian antara supervisor dengan guru yang disupervisi jelas akan menghambat bentuk perlakuan yang diberikan.

Namun demikian, kondisi tersebut diatas masih jamak terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Hal ini disinyalir karena keterbatasan jumlah pengawas sekolah sehingga belum seluruh guru bidang studi memiliki pengawas bidang studi maupun rumpun bidang studi. Senada dengan hal tersebut, Pidarta (2009:25) menyatakan bahwa di Indonesia pada awalnya belum memiliki supervisor bidang studi. Pengadaan supervisor bidang studi baru dimulai beberapa tahun belakangan ini yang diambil dari guru-guru senior. Supervisor bidang studi tersebut juga belum bisa sepenuhnya dikatakan sebagai supervisor

karena surat keputusan untuk keperluan itu belum dikeluarkan. Padahal keberadaan supervisor bidang studi sangat diperlukan untuk membimbing dan membantu guru-guru terkait masih banyaknya guru bidang studi yang masih sulit menguasai materi maupun teknik-teknik pengajaran.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menarik untuk dikemukakan beberapa data pengawas sekolah (PS) SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora), Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang merupakan wilayah administratif yang akan dijadikan lokasi penelitian ini. Adapun, data yang dapat diungkap terkait dengan jumlah, latar belakang pendidikan, dan sebaran PS di kabupaten ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pengawas sekolah SMA (PS SMA) sebanyak tiga orang.
- 2) Latar belakang pendidikan meliputi Kimia satu orang, Biologi satu orang, dan Fisika satu orang.
- 3) Jumlah sekolah binaan adalah tujuh belas SMA negeri dan satu SMA swasta.

Data tentang jumlah dan sebaran PS di atas setidaknya memperlihatkan bahwa di lingkungan Disdikbudpora Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Permenpan-RB 21/2010), sasaran pengawasan setiap PS SMP/MTs dan SMA/SMK/MAK paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran. Dengan demikian, rasio jumlah PS dengan jumlah satuan pendidikan sudah terpenuhi, yaitu 1 : 6. Tetapi dari segi sebaran PS per mata pelajaran/kelompok mata pelajaran masih sangat kurang. Dimana belum ada PS untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (di luar PS

di lingkungan Kantor Kementerian Agama), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Penjasorkes, dan Seni Budaya.

Lantas, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang supervisor (pengawas dan kepala sekolah) jika di daerahnya tidak atau belum memiliki pengawas bidang studi pelajaran tertentu? Maka solusi yang bisa dilakukan terhadap persoalan ini menurut Pidarta (2009: 175) adalah mengoptimalkan peran guru-guru senior guna membantu pelaksanaan supervisi sebaya atau sebaya. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa supervisi sebaya merupakan pertemuan guru-guru bidang studi yang berspesialisasi sama, karena hanya guru senior yang spesialisasinya sama yang mudah memberi bantuan dan mudah memahami persoalan yang dihadapi guru tersebut.

Selain masalah kualitas supervisi, kuantitas pelaksanaan supervisi juga akan mempengaruhi kinerja guru. Semakin sering seorang supervisor berkunjung dan memberikan pembinaan terhadap guru-guru, maka kinerjanya akan semakin meningkat. Namun sebaliknya, jika frekuensi kunjungan dan bimbingan supervisor tersebut rendah maka juga akan berimplikasi terhadap *performace* guru binaannya. Sudjana (2012: 1) misalnya, dengan menarik mengilustrasikan tentang rendahnya kuantitas dan ketidakteraturan kehadiran pengawas sekolah di sekolah, hampir semua kepala sekolah mengatakan kehadiran pengawas sekolah terutama hanya pada waktu-waktu tertentu misalnya pada awal tahun ajaran baru, awal semester, saat ulangan umum, saat ujian sekolah, saat ujian nasional, akreditasi sekolah, perpisahan kelas dan jika diundang juga pada saat wisuda peserta didik. Ilustrasi tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah masih belum terjadwal dan intensitasnya masih

rendah. Senada dengan yang dikemukakan oleh Sudjana, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dalawi, Zakso, dan Radiana (2013:15) menyimpulkan frekuensi kunjungan supervisi akademik oleh pengawas sekolah di SMP Negeri 1 Bengkayang baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas dianggap masih belum optimal. Salah satu kendala pengawas dalam mensupervisi yaitu kurangnya penguasaan mereka akan materi yang akan disupervisi, terlebih jika mereka harus mensupervisi guru – guru bidang studi yang berbeda dengannya. Supervisi baru diprioritaskan kepada guru-guru yang sudah disertifikasi, guru baru, dan guru-guru yang mau naik pangkat. Namun demikian rendahnya kuantitas ini terkendala oleh terbatasnya waktu yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari: (1) pengawas satuan pendidikan, dan (2) pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Ruang lingkup tugas pengawas adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalensinya sama dengan 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Sudjana (2012: 116) menambahkan bahwa beban kerja pengawas sekolah 4 (empat) hari dalam seminggu berada di sekolah binaan dan 1 (satu) hari berada di kantor untuk menyusun laporan hasil pengawasan. Sementara itu kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG).

Musyawarah guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan suatu wadah bermusyawarahnya para guru mata pelajaran sejenis dalam suatu jenjang baik SMP atau SMA. MGMP juga merupakan suatu forum atau wadah kegiatan profesionalisme guru yang kegiatan di dalamnya dari oleh dan untuk guru. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Satori (1998 : 28) bahwa : "Jalur lain yang sifatnya non struktural adalah pemanfaatan forum gugus mata pelajaran sejenis di sekolah yaitu MGMP. Wadah dari-oleh-untuk guru tersebut sangat strategis dimanfaatkan sebagai mekanisme andal dalam supervisi akademik". Musyawarah guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMA merupakan wadah kegiatan guru pada jenjang SMA untuk memecahkan segala permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan serta menyempurnakan proses pembelajaran, diantaranya adalah : a) Perbedaan penguasaan materi pelajaran, dan b) Hal-hal yang menunjang dan berhubungan dengan proses belajar mengajar. Jadi, organisasi MGMP secara keseluruhan merupakan wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian para anggotanya. Melalui organisasi MGMP para guru bermusyawarah untuk melakukan perbaikan dalam menyempurnakan proses pembelajaran dan pendalaman materi pelajaran. Melalui wadah ini pula guru saling berinteraksi satu sama lain sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang erat yang akan melahirkan rasa simpati dan empati diantara para pendidik sebagai wujud dari kompetensi sosial dan kepribadian.

Berkaitan dengan MGMP yang dapat difungsikan sebagai wadah kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru, maka pengawas sekolah dituntut mampu mensinergikan fungsi kepengawasannya kedalam program kerja MGMP. Pengimplementasian teknik supervisi sebaya, juga bisa dilakukan dalam

wadah ini. Hal ini memungkinkan untuk menghindari kejenuhan para guru dalam kegiatan MGMP yang sejauh ini terkesan monoton dan tidak inovatif.

Hasil penelitian Rus'an (2014) dengan judul "*Analisis Dampak Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Guru Melalui Program Bermutu Terhadap Kegiatan MGMP di Kabupten Parigi Mautong*" menemukan bahwa terdapat beberapa penyebab rendahnya antusiasme dan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan MGMP, yaitu:

1. Kegiatan MGMP cenderung monoton dan kurang variatif
2. Kegiatan MGMP cenderung hanya mengejar target akhir yang berupa penyelesaian tagihan-tagihan dengan mengabaikan substansi terhadap tagihan tersebut.
3. Kurangnya nara sumber berkualitas yang dapat memotivasi mengikuti kegiatan MGMP ini.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Ilham Mahmud (2012) dengan judul "*Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru SMA di Kota Batu*" menemukan beberapa kendala terhadap pelaksanaan MGMP sebagai berikut:

1. Rendahnya kehadiran guru disebabkan oleh tuntutan jam mengajar 24 jam/minggu sehingga jadwal kegiatan MGMP sering berbenturan dengan jadwal mengajar.
2. Forum MGMP kurang bervariasi dalam melakukan kegiatan sehingga terkesan membosankan.

3. Kegiatan MGMP hanya berfokus dalam pembuatan perangkat mengajar.
4. Tidak memiliki dana yang cukup sehingga tidak bisa menghadirkan pemateri yang berkompeten.

Hasil wawancara awal dengan beberapa orang guru yang terlibat sebagai anggota dan pengurus MGMP bahasa Inggris Kabupaten Tebo, bahwa pelaksanaan MGMP bahasa Inggris Kabupaten Tebo hanya berpangku pada dana blockgrant, ketika sumber dana tersebut dihentikan maka organisasi ini terkesan mati suri. Partisipasi atau kehadiran anggotanya sebagai indikator organisasi yang dinamis sangat rendah. Selain itu, MGMP bahasa Inggris kabupaten Tebo juga belum memiliki struktur kepengurusan yang solid. Struktur kepengurusan hanya terdiri atas dua orang guru inti yang merangkap sebagai ketua dan bendahara. Pengangkatan guru inti juga belum didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, karena sejauh ini MGMP bahasa Inggris juga belum memiliki AD/ART. Akibatnya pembagian tugas dan pendelegasian wewenang dalam kepengurusan MGMP masih sangat lemah. Hal tersebut semakin mempertegas betapa pengorganisasian dalam tubuh MGMP bahasa Inggris masih lemah dan sangat memprihatinkan.

Dua penelitian tersebut dan juga kondisi *rill* MGMP bahasa Inggris kabupaten Tebo mengilustrasikan betapa organisasi MGMP belum dinamis dan kurang bisa terlaksana secara optimal.

Mengingat betapa pentingnya peran supervisi akademik teknik sebaya yang bisa disinergikan kedalam kegiatan MGMP dalam meningkatkan profesionalitas guru, ini perlu dikelola secara baik agar dapat memberi sumbangsih bagi pencapaian tujuan pendidikan. Tugas-tugas supervisi akademik

meliputi: menyusun program supervisi, melaksanakan supervisi, mengevaluasi pelaksanaan hasil supervisi, melaksanakan pembinaan dan menyusun laporan hasil supervisi (Sudjana, 2012: 28). Pelaksanaan supervisi akan berjalan lancar apabila semua pihak yang terlibat dalam supervisi akademik mengetahui tugas masing-masing dan juga memberikan tugas pada orang yang tepat sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Hal ini berarti fungsi pengorganisasian perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan supervisi akademik.

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) memegang peranan yang sangat penting setelah perencanaan. Pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan tujuan organisasi, pembagian dan pelimpahan tugas, serta penyusunan struktur organisasi. Jadi, hasil akhir dari aktivitas pengorganisasian adalah terbentuknya sebuah struktur organisasi (Vita dkk, 2013: 74). Struktur tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan siapa melakukan apa, siapa berada dimana, serta siapa melapor kepada siapa dalam hubungan pekerjaan. Situasi seperti ini tentu saja sangat bermanfaat karena setiap anggota organisasi akan mengetahui posisi dan tanggungjawabnya masing-masing. Tanpa diorganisir dengan baik, mustahil rencana-rencana yang telah dibuat dapat terlaksana dengan optimal. Pengorganisasian menurut Handoko dalam Usman (2014: 170) ialah (1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi ; (2) proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan; (3) penugasan tanggung jawab tertentu; dan (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Dalam

konteks tersebut, pengorganisasian juga dimaknai penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

Sutarto (2002: 158) mengemukakan masalah yang umum terjadi dalam sebuah organisasi, seperti: para pejabat tidak mengetahui dan meyakini tujuan organisasi, adanya pembentukan satuan organisasi yang tidak berlandaskan pada pengembangan volume kerja, terjadinya perangkapan tugas pada satu bagian sedangkan di bagian lain terjadi kekosongan pekerjaan, sempitnya pendelegasian wewenang, dan masih banyak lagi. Salah satu sarana agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan struktur organisasi yang bersangkutan sehat dan efisien maka mereka harus melaksanakan asas-asas organisasi. Banyak ahli berpendapat mengenai asas atau prinsip organisasi yang penting. Seperti yang diungkapkan oleh Gibson, Donnely, dan Ivancevich, “Dua keputusan pengorganisasian yang paling mempengaruhi kerja individual adalah pembagian kerja dan pendelegasian wewenang” (1996: 244).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangastuti, Santosa, Hamidi dengan judul *Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Pembagian Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan BTN Surakarta*. November, 2013. menyatakan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendelegasian wewenang terhadap prestasi kerja karyawan, (2) terdapat interaksi pengaruh positif dan signifikan antara pendelegasian wewenang dan pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan.

Dari paparan persoalan diatas dipandang perlu untuk mempelajari dan merumuskan model pengorganisasian Musyawarah Guru Mata Pelajaran melalui supervisi sebaya yang sekaligus bisa menjadi solusi guna mengakomodir keterbatasan pengawas mata pelajaran bahasa Inggris.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, secara umum dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kinerja pengawas di kabupaten Tebo masih rendah hal ini terlihat dari hasil UKPS yang masih dibawah standar.
2. Kinerja guru bahasa Inggris SMA di Kabupaten Tebo masih rendah, hal ini tercermin dari hasil UKG yang masih dibawah rata-rata.
3. Tidak terdapat supervisor bidang studi bahasa Inggris sehingga supervisor eksternal sering menemui kendala dalam memberikan supervisi terkait pendalaman materi bidang studi bahasa Inggris.
4. Pengorganisasian MGMP bahasa Inggris tidak efektif terlihat dari struktur organisasinya yang masih lemah.
5. Belum adanya penelitian tentang kondisi faktual pengorganisasian MGMP dalam penerapan supervisi akademik teknik sebaya bagi guru SMA di Kabupaten Tebo, sebagai landasan untuk mengembangkan model pengorganisasian MGMP yang cocok bagi guru-guru SMA di Kabupaten Tebo.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah umum yang tergambar pada identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi faktual pengorganisasian guru dalam penyelenggaraan MGMP di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana pengembangan model pengorganisasian Musyawarah Guru Mata Pelajaran melalui supervisi sebaya?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan model faktual pengorganisasian Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Kabupaten Tebo.
2. Mendesain model teoritik pengorganisasian Musyawarah Guru Mata Pelajaran melalui supervisi sebaya.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pengorganisasian Musyawarah Guru Mata Pelajaran melalui supervisi sebaya.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi pengurus MGMP bahasa Inggris Kabupaten Tebo, dapat digunakan sebagai acuan model pengorganisasian dengan terbentuknya struktur organisasi MGMP yang solid yang bisa mewadahi kegiatan supervisi sebaya bagi guru bidang studi bahasa Inggris.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo dalam upaya meningkatkan kinerja pengawas sekolah terkait pelaksanaan tugas supervisi akademik.
- c. Sebagai sumber informasi bagi pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan pemahaman para guru di sekolah-sekolah binaannya tentang supervisi sebaya.
- d. Sebagai sumber informasi bagi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan pemahaman para guru di sekolah yang dipimpinnya tentang supervisi sebaya.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam skala yang lebih luas sehingga desain produk yang dihasilkan bisa lebih komprehensif.